



Judul : Pembahasan RUU Pilkada Butuh Ketepatan Waktu
Tanggal : Kamis, 23 Nopember 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 5

Pembahasan RUU Pilkada Butuh Ketepatan Waktu

REVISI Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah disahkan menjadi usulan inisiatif DPR dipastikan akan membahas dua hal utama, yakni jadwal pelaksanaan pilkada yang berubah menjadi September dari sebelumnya November 2024. Kemudian dilanjutkan membahas tentang jadwal pelantikan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih nantinya.

"Iya, setelah ini disahkan kemarin, maka yang akan dibahas utama seperti yang sudah disepakati di Badan Legislasi poin revisinya memajukan pelaksanaan pilkada. Lalu bahas soal keserentakan pelantikan anggota DPRD yang terpilih di provinsi, kabupaten, dan kota pada November 2024 setelah DPR dan presiden. Maka

akan ada kekosongan pada Agustus-September dan itu tidak bisa diambil legislatif, jadi kemungkinan ada perpanjangan masa jabatan," ungkap anggota Komisi II DPR Faraksi Partai NasDem Aminurokhman, kemarin.

Dia menilai pembahasan revisi tersebut memang membutuhkan ketepatan waktu sehingga pembahasannya harus dilakukan oleh alat kelengkapan dewan yang memang selama ini membahas tentang kepemiluan.

"Cukup tidaknya waktu pembahasan tergantung dari pimpinan DPR untuk menunjuk alat kelengkapan dewan yang membahasnya, Baleg atau komisi dua. Kalau saya berpikirknya lebih pas komisi dua karena yang selama ini membahas pemilu," jelasnya.

Terpisah, anggota Komisi II DPR Guspari Gaus mengatakan wacana tentang keserentakan pelantikan anggota DPRD sempat mengemuka dalam rapat Badan Legislasi namun hal itu belum bisa dipastikan.

"Itu masih digodok oleh pemerintah. Jadi memang keserentakan tidak hanya Pileg dan Pilkada 2024, tapi kita berupaya melakukan keserentakan pelantikan kepala daerah, DPRD kabupaten, kota dan provinsi," jelasnya.

Secara terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan pihaknya tak mempermasalahkan rencana Pilkada 2024 yang dimajukan pada September. Menurut komisioner KPU RI August Melasz, pada prinsipnya KPU akan mengikuti arahan sesuai UU Pilkada.

August menekankan pihaknya

juga terus mengawal sembari melakukan mitigasi jika ada provinsi atau kabupaten/kota yang terkendala pembiayaan. "Kalau terkendala, maka mau tidak mau kami harus komunikasi dengan pihak Kemendagri," tandasnya.

Menanggapi hal itu, Manajer Program Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhani menyebut pemajuan jadwal pilkada akan berdampak pada beban kerja penyelenggara.

"Juga berpotensi akan berhimpitan dengan tahapan perselisihan hasil pemilu. Bisa dibayangkan, di satu sisi harus menyelesaikan tahapan di ujung pemilu nasional, tetapi harus memulai tahapan-tahapan awal pilkada," ujarnya. (Ykb/Sru/P-3)